



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT. Askes (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 29 September 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas rencana program Jamkesmen bagi Anggota DPR RI; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas PT. Askes (Persero); 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn /Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 34 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 5 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Direktur Utama PT.Askes (Persero) dibuka pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (JAMKESMEN)
 - a. Definisi: Jamkesmen merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas pelayanan yang paling tinggi (VVIP) kepada Menteri dan Pejabat Tertentu selama melaksanakan tugasnya.
 - b. Program ini merupakan program baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 dimana Pemerintah menunjuk PT Askes untuk melaksanakannya.

- c. Dasar Hukum:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/02/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.
 - c. Peserta adalah menteri atau pejabat tertentu beserta keluarganya selama yang bersangkutan melaksanakan tugas.
 - d. Identitas peserta berupa Kartu Jamkesmas. Dalam keadaan darurat (*emergency*) dan peserta belum memiliki Kartu Jamkesmas, peserta dapat menggunakan identitas lain (kartu pegawai) dengan melampirkan surat pengangkatan dan segera mengurus Kartu Jamkesmas.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)
 - a. Definisi: Merupakan Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang SJSN.
 - b. Tujuan: Membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah agar memperoleh pelayanan kesehatan dan untuk melaksanakan program secara akuntabel, kehati-hatian, transparan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Managed Care* dan *Good Corporate Governance*.
 - c. Gambaran perkembangan PJKMU: pada tahun 2008 terdapat 32 kabupaten/kota yang ikut PJKMU dan jumlah ini meningkat menjadi 72 kabupaten/kota pada tahun 2009 serta 181 kabupaten kota per September 2010.
 3. Askes sosial
Terdapat peningkatan manfaat bagi peserta Askes Sosial berupa adanya program promotif dan preventif yaitu:
 - a. Medical check up bagi peserta \geq 40 tahun
 - b. Pap smear bagi peserta \geq 35 thn
 - c. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) misalnya untuk penyakit DM
 - d. Vaksinasi Hepatitis B
 - e. Senam sehat
 4. Laporan Keuangan PT AskesTahun 2009 yang telah diaudit
Laba (rugi) bersih konsolidasi untuk tahun 2009 tercatat sebesar Rp 2.176.919.000.000.

III. KESIMPULAN:

1. Komisi IX DPR RI menerima pemberitahuan dari PT. Askes mengenai program Jamkesmas dan menugaskan kepada Anggota Banggar Komisi IX DPR RI untuk mengkonfirmasi program Jamkesmas kepada Menteri Keuangan dan dengan Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja Komisi.

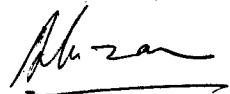
2. Komisi IX DPR RI mendukung program PJKMU untuk lebih ditingkatkan dan semakin berkualitas.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. Askes untuk menyampaikan laporan tertulis penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan menghimbau agar penyaluran dana tersebut dapat berlangsung tepat sasaran sebagai komitmen kepedulian terhadap masyarakat.

Rapat ditutup pukul: 12.45 WIB.

Jakarta, 29 September 2010

Pimpinan Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, SpAn 